

Meluruskan Tugas Penguasa dan Oposisi

Oleh Nurudin*

TENTU saja, tugas penguasa dengan oposisi itu berbeda. Jika ditukar-tukarkan posisinya demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, akan dianggap aneh manakala oposisi itu justru mendukung atau memperkuat penguasa dan sebaliknya. Lebih aneh lagi jika pendukung penguasa menghendaki oposisi itu ikut mendukung pemerintah.

Sebenarnya, tugas penguasa dan oposisi dimanapun itu sama. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis peran oposisi sangatlah penting. Ia bertugas untuk menyeimbangkan tugas penguasa. Sebab, tanpa ada keseimbangan maka kecurigaan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*).

Namun demikian, dalam sistem pemerintahan yang baru mengklaim demokratis peran keduanya sering disalahpahami bahkan saling ditukar-tukarkan perannya. Yang kemudian muncul adalah suasana saling menguasai dan buntutnya hanya memperebutkan kekuasaan semata. Ini tidak salah, yang tidak bagus manakala penguasa itu sudah alergi terhadap kritik sementara oposisi sudah lemah dalam gerakannya.

Atas Nama

Tugas oposisi itu mengkritisi kebijakan pemerintah, dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, tugas pemerintah adalah memberikan bukti data kongkrit atas apa yang dilakukan berdasar kritik oposisi yang ada. Lebih tepatnya, kritik oposisi tentu harus didasarkan pada data, sementara pemerintah juga memberikan pembelaan diri berdasar data yang ada juga. Jika oposisi mengkritisi tanpa data, pemerintah juga punya hak untuk tak memberikan data. Jika pemerintah bekerja hanya untuk pencitraan semata, oposisi punya kemungkinan mengkritik

tanpa data pula.

Maka, karena tugas oposisi itu mengkritisi kebijakan pemerintah, maka pemerintah dengan segala daya upaya membuktikan dengan data. Jika yang dikritik oposisi itu tidak ada data, maka pemerintah bisa "menghukum" oposisi tersebut. Namun sebelum "hukuman" dijatuhkan, tugas pemerintah adalah memproses secara hukum terhadap apa yang dituduhkan pada pemerintah itu. Dalam hal ini, tidak elok jika setiap kritikan oposisi justru membuat mereka dilaporkan kepada aparat penegak hukum dengan alasan "mencemarkan nama baik". Namun, ada atau tidak ada data kritik oposisi, pemerintah tidak perlu sewot. Namanya juga masih belajar berdemokrasi.

Di Indonesia, demokrasinya masih tersandera kepentingan. Artinya mereka yang selama ini meniadakan penegakan demokrasi sebenarnya punya kepentingan. Oleh karena itu, tafsir demokrasi juga sangat tergantung posisi masing-masing. Pemerintah akan mengatakan bahwa demokrasi itu keteraturan karena mereka punya kepentingan untuk itu. Sementara oposisi bisa mengatakan demokrasi itu adalah menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam segala bentuknya dan penegakan hukum tanpa pilih kasih. Dalam hal ini demokrasi masih berada dalam tafsir kepentingan sepihak.

Dengan demikian, apa yang diucapkan ideal oleh pemerintah atau bukan karena punya kepentingan atas nama demokrasi. Lihat saja bagaimana komentar-komentar atau debat antar mereka di media massa penuh dengan membela diri. Jadi bukan pada alasan penegakan demokrasi tetapi kepentingan atas nama demokrasi.

Mengapa PDI-P yang dahulunya sangat getol mengkritik kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini tiarap? Kemana mereka saat ini, padahal waktu pernah melakukan walk out bahkan menangis saat pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak

(BBM)?

Kita tidak perlu risau atas itu semua. Masalahnya, waktu itu mereka sedang berada dalam kedudukan oposisi atau lebih tepatnya sedang ingin merebut kekuasaan. Kita harus maklumi itu karena memang tugas mereka sebagai oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Saat sekarang mereka berkuasa maka mereka tentu akan membela penguasa saat ini. Apakah mereka salah? Bukan soal salah atau tidak, tetapi kedudukan mereka sebagai oposisi memang menuntut seperti itu. Jika pada akhirnya saat ini ada oposisi kritis, bisa dianggap wajar karena memang tugasnya seperti itu, bukan?

Salah Kaprah

Sebagai penulis saya merasakan suasana ketidaknyamanan saat ini. Tugas penulis itu tentu berusaha meluruskan yang masih bengkok dan mendukung yang sudah lurus. Sejak saya menulis di media cetak, tulisan saya berusaha mengkritisi kejanggalan yang ada dalam pemerintah dan masyarakat. Hanya pada zaman Orde Baru (Orba) tulisan saya banyak yang mengkritik pemerintah karena memang sudah menjadi kekuasaan tanpa kontrol secara efektif.

Zaman terus berubah, saat SBY berkuasa untuk periode kedua dan tidak ada perubahan yang sangat mendasar, terutama ketergantungan pada luar negeri, saya mengkritik pemerintah. Tentu bukan tanpa alasan. Bagi saya, kewibawaan sebagai negara dan kemandirian masyarakat menjadi hal utama bagi saya sebagai penulis. Yang saya kritik tentu sistem pemerintahannya, bukan individu penguasanya.

Namun demikian, saat ini saya serba salah. Mengkritik pemerintah dianggap tidak suka pada presiden sebagai individu. Bisa jadi ini perasaan saya, tetapi berbagai komentar sinis dalam media sosial pertemanan saya menjadi bukti itu. Bagi saya, pengkritik pemerintah itu kewajiban seorang akademisi dan

pengamat, tentu dengan sudut pandang masing-masing. Intinya adalah, jika tidak mau dikritik jangan menjadi seorang pemimpin. Untung saja, presiden Jokowi orang yang rendah hati, yang justru sewot hanya para pendukungnya.

Sama Penting

Pemerintah, dalam banyak kasus selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara oposisi selalu ingin merebut kekuasaan. Jika itu dikaitkan dengan Pilpres, Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sementara Prabowo ingin merebut kekuasaan. Ini sesuatu yang sangat lumrah dan tak perlu para pengikutnya ikut-ikutan sewot. Apakah Jokowi harus berposisi oposisi sementara Prabowo membela pemerintah? Jika Jokowi itu menjadi oposisi sementara Prabowo petahana, para pendukung Jokowi tentu akan berposisi seperti pendukung Prabowo saat ini.

Yang aneh adalah makin kuatnya sindiran, kritikan, hujatan yang mengarah pada caci maki. Mengukur elektabilitas keduanya tentu juga dengan tolok ukur sama. Tentu tidak adil jika kriterianya adalah capaian program kerja. Masalahnya, Jokowi tentu punya bukti kerja karena memang pernah menjadi presiden, sementara Prabowo tentu tidak punya karena belum pernah menjadi presiden. Juga, akan aneh manakala mengukur keduanya dengan lomba menembak karena sebagai tentara tentu Prabowo akan lebih baik.

Tapi, politik adalah jualan yang sering menghalalkan segala cara. Kalau orang sudah telanjur berci atau cinta ia tidak akan bisa objektif menilai sesuatu. Dalam posisi ini, kita diingatkan pada tugas masing-masing penguasa dan oposisi yang sama-sama berguna bagi pengembangan kemajuan masyarakat di masa datang.

Penulis dosen Ilmu Komunikasi,
Fisip Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM)